

Pentingnya Melakukan Vaksinasi HPV Sebelum Menikah

Vaksinasi HPV tidak hanya mencegah bahaya kanker serviks, tetapi juga penyakit terkait HPV lainnya, seperti beberapa penyakit kulit dan kelamin pada pria.

JAKARTA (IM) - Menurut data GLOBOCAN 2020, kanker serviks adalah kanker perempuan terbanyak kedua dengan jumlah kasus 36.633 (17,2%) di Indonesia, dan membunuh 57 perempuan Indonesia setiap harinya. Angka tersebut meningkat hampir 15% dari tahun 2018. Artinya, sebanyak lebih dari 21.000 keluarga di Indonesia

setiap tahunnya ditinggalkan oleh ibu, anak perempuan atau istri karena kanker serviks. Hal ini mengakibatkan beban sosial begitu besar bagi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga Indonesia ke depannya.

Padahal, kanker serviks merupakan satu-satunya kanker yang dapat dicegah dengan vaksinasi HPV. Rekomendasi vaksinasi HPV juga sejalan dengan strategi global

WHO untuk mencakup hingga 90% vaksinasi HPV, 70% cakupan skining, dan 90% akses ke perawatan terkait di semua negara.

Selain itu, vaksinasi HPV tidak hanya mencegah bahaya kanker serviks, tetapi juga penyakit terkait HPV lainnya, seperti beberapa penyakit kulit dan kelamin pada pria.

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dr. Diana Mauria Ratna Asih, Sp. OG menuturkan, berdasarkan Center for Disease Control (CDC) Amerika Serikat, 8 dari 10 orang akan terinfeksi HPV dalam masa hidupnya.

“Oleh karena itu vaksinasi HPV direkomendasikan sebagai upaya pencegahan primer. Vaksin

HPV dapat diberikan kepada wanita dan pria, serta para pasangan yang memiliki rencana untuk membangun keluarga yang sehat karena infeksi HPV juga berisiko untuk kesehatan janin,” ungkap dr Diana, beberapa waktu lalu.

Dia memaparkan, kanker serviks juga dikenal sebagai silent killer bagi kaum perempuan karena inkubasi HPV tidak menunjukkan gejala apapun dan butuh waktu lama, bahkan dapat lebih dari sepuluh tahun untuk berkembang menjadi kanker serviks.

“Seringnya kanker serviks terdeteksi pada perempuan usia produktif, dimana perannya masih sangat dibutuhkan dalam kelu-

arga,” terang dr. Diana.

Ketua Umum CISC dan Pengagagas KICKS, Aryanthi Baramuli Putri, SH., MH mengatakan, pihaknya melakukan edukasi berkelanjutan terhadap masyarakat luas untuk melakukan pencegahan kanker serviks dan deteksi dini karena Melukakan vaksinasi HPV sangatlah penting, karena virus ini dapat dicegah.

“Vaksin HPV merupakan investasi kesehatan sebagai langkah perlindungan utama khususnya bagi perempuan dari berbagai macam penyakit di masa depan yang diakibatkan virus HPV,” ucap Aryanthi. ● tom

SAMBUNGAN

penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. Surat terkait ini sudah dikirim ke DPR RI pada 30 Maret 2021.

Gantian Nadiem?

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti layak dipertimbangkan untuk menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbu-

Resuffle Kabinet, Prof.Abdul Mu'ti...

distek).

Direktur Indonesia Government And Parliament Watch (IGPW), M Huda Prayoga meyakini Abdul Mu'ti dapat membawa dunia pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Ia menilai Nadiem Anwar Makarim gagal dalam mengurus pendidikan di Tanah Air. Hal tersebut dikuatkan dengan sejumlah penilaian dari lembaga pemerhati pendidikan, lembaga survei dan pandangan praktisi pendidikan.

“Sedangkan dalam wacana reshuffle kali ini juga, ada nama Mas Mu'ti yang mengemuka. Beliau dengan rekam jejaknya dinilai publik sebagai sosok yang memiliki kompetensi untuk memperbaiki pendidikan Indonesia,” kata Huda, Minggu (18/4).

Huda menilai kuatnya respons publik terhadap isu reshuffle ini sebagai sesuatu yang wajar dan baik. Hal ini menunjukkan kepedulian publik terhadap pemerintah serta adanya semacam ketidakpuasan

masyarakat akan kinerja pembantu Presiden.

Para menteri dituntut bekerja optimal untuk kepentingan rakyat.

Walau demikian, lanjut dia, Presiden juga tetap harus mempertimbangkan suara publik tentang menteri-menteri yang dianggap tidak punya kinerja baik.

Mendikbud Nadiem, sambilan Huda, adalah salah satu menteri yang disorot kuat oleh publik. Sedangkan nama Abdul Mu'ti yang

DARI HAL 1

saat ini digadag-gadag menggantikan posisi Nadiem, memang memiliki pemahaman yang baik terhadap kompleksitas masalah pendidikan di Tanah Air.

“Saya pikir kalau Mas Mu'ti diberikan amanah oleh Presiden, akan memberikan kontribusi besar terhadap dunia pendidikan tanah air. Beliau adalah sosok pendidik, track record nya jelas serta paham terhadap peta persoalan pendidikan di Indonesia,” tutur Huda. ● mar

Guru Besar FKU: Uji Klinis Tahap Kedua...

peraturan pemerintah,” kata Akmal dalam konferensi pers mendukung BPOM, Sabtu (17/4).

Akmal menjelaskan, pelanggaran jelas terlihat ketika dilanjutkannya uji klinis padahal pada tahap pertama uji klinis dinilai belum memenuhi syarat untuk berlanjut ke fase tahap dua.

“Kan sudah dinilai itu belum memenuhi syarat untuk boleh melanjutkan ke fase dua, itu mestinya yang enggak boleh dilakukan. Itu sangat clear saya kira,” ujarnya.

Namun, jika dilihat secara etik, pelanggaran juga bisa mengenai peneliti dari vaksin tersebut. “Karena secara kedokteran kita juga mempunyai etik dan melakukan suatu uji klinis itu kita mesti ikut juga pada aturan mendapatkan

legal clearance,” katanya.

Uji klinis tahap kedua Vaksin Nusantara belakangan menuai kontroversi di masyarakat. Pasalnya, uji klinis fase kedua vaksin Nusantara tetap dilanjutkan meski belum mendapatkan izin atau Peretujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dari BPOM.

Menariknya lagi, sejumlah anggota Komisi IX bahkan menjadi relawan pengembangan vaksin. Sampel darah mereka diambil di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu (14/4). Sementara berdasarkan data studi vaksin Nusantara, tercatat 20 dari 28 subjek atau 71,4 persen relawan uji klinis fase I mengalami Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dalam grade 1 dan 2.

Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, relawan mengalami kejadian yang tidak diinginkan pada kelompok vaksin dengan kadar adjuvant 500 mcg.

“Dan lebih banyak dibandingkan pada kelompok vaksin dengan kadar adjuvant 250 mcg dan tanpa adjuvant,” kata Penny, dalam keterangannya tertulis yang diterima wartawan pada Rabu (14/4).

DPR Jangan Intervensi BPOM

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) minta DPR tidak intervensi BPOM terkait Vaksin Nusantara. Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan DPR semestinya hanya sebatas mengawasi kinerja BPOM sebagai lembaga pemerintah tanpa

perlu mengambil alih kerjanya.

“Hemat saya, betul DPR kerjakan dalam rangka pengawasan kelembagaan memang kerjanya mengawasi pemerintah dan lembaga-lembaga di dalamnya. Tetapi seharusnya yang diawasi adalah kerjanya, jangan sampai kemudian sekolah-lah DPR mengambil alih kinerja, itu harus dijaga,” kata Daeng, Sabtu (17/4).

Daeng berpendapat, intervensi yang dilakukan oleh DPR dapat membuat lembaga-lembaga profesional seperti BPOM rentan dimasuki unsur-unsur politis.

Sebab, menurut Daeng, setiap keputusan yang dikeluarkan DPR adalah keputusan politis meskipun keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan masukan dari

para pakar.

“Pekerjaan profesional ini harus dijaga, karena prosedur keilmuan yang dikerjakan, jangan sampai prosedur keilmuan itu kemudian ada intervensi,” kata Daeng. I

a menambahkan, intervensi tersebut juga dapat merobohkan kepercayaan publik terhadap BPOM yang dibangun sejak lama. Daeng yakin bahwa BPOM masih bekerja sesuai dengan jalurnya dalam menjalankan tugasnya.

“Itu membangunnya luar biasa dan sudah banyak yang dikerjakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan rakyat. Masa kita bangkangkan isu-isu yang kemudian menjatuhkan kehormatan kelembagaan,” katanya. ● mar

Survei LSI: Menurut PNS, Korupsi...

berbeda di Indonesia. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, sebanyak 34,6 persen PNS menyatakan korupsi meningkat dalam 2 tahun terakhir. Sementara yang menyatakan menurun sekitar 25,4 persen dan menyatakan tidak mengalami perubahan sebanyak 33,9 persen. “Jadi kalau mayoritas yang non-PNS yang sudah disurvei beberapa waktu lalu ini, menyatakan persepsi korupsi meningkat akhir-akhir ini ada dalam waktu 2 tahun terakhir, PNS tidak mayoritas yang mengatakan begitu,” ujar Djayadi saat memaparkan hasil survei melalui daring, Minggu (18/4).

Sementara jika dibandingkan dengan opini publik, pebisnis maupun pemuka opini, PNS yang me-

nyatakan korupsi meningkat dalam 2 tahun terakhir lebih sedikit.

Opini publik sebanyak 56,4 persen, pebisnis sebanyak 58,3 persen, pemuka opini sebanyak 57,6 persen. Sedangkan PNS hanya sebesar 34,6 persen.

Selanjutnya, kata Djayadi, bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling banyak terjadi di instansi pemerintah adalah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi yang paling banyak. Yakni sebesar 26,2 persen.

Selanjutnya disusul dengan kerugian keuangan negara sebesar 22,8 persen dan gratifikasi sebesar 19,9 persen. “Jadi itu 4 besarnya,” kata Djayadi.

Dalam survei ini pun turut didalami pengetahuan para PNS di bagian yang sering terjadinya korupsi. PNS yang mengatakan

korupsi yang paling sering terjadi di bagian pengadaan sebanyak 47,2 persen. Sementara yang menyebut di bagian perizinan usaha sebanyak 16 persen, bagian keuangan sebanyak 10,4 persen, bagian pelayanan dan personalia di bawah 10 persen.

“Jadi memang kalau lihat data ini berarti memang yang paling penting untuk menjadi sorotan utama dalam reformasi birokrasi adalah bagian pengadaan. Meskipun di bagian perizinan, keuangan dan pelayanan juga menjadi catatan berdasarkan persepsi PNS yang disurvei ini,” jelas Djayadi.

LSI melakukan survei dengan populasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga, di pusat maupun daerah. Sebanyak 1,201 PNS menjadi responden survei yang diwawancarai pada 3 Januari

hingga 31 Maret 2021.

“Ini istilah-istilah korupsi yang ada di Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi dan yang paling banyak adalah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi,” kata Djayadi.

Dalam survei ini, para PNS yang menjadi responden ditanyakan tentang persepsi dan penilaian mereka terhadap korupsi dan potensi korupsi, suap/gratifikasi, upaya pengawasan internal, dan pengaduan.

Populasi survei adalah seluruh PNS di lembaga-lembaga negara dengan jumlah PNS yang besar serta beberapa lembaga negara lainnya sesuai pertimbangan studi di tingkat pusat dan tingkat provinsi yang tersebar di 14 provinsi.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak (stratified multi-

stage random sampling) dari populasi tersebut, dilakukan oversample sebanyak 200 responden yang tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga, sehingga total sample yang direncanakan sebanyak 1.200 responden. Karena kendala teknis sulitnya mengakses responden di beberapa Kementerian/Lembaga, maka dilakukan penambahan atau perubahan Kementerian/Lembaga. Total sampel akhir yang dianalisis sebanyak 1.201 responden.

Jumlah populasi PNS pada Kementerian/Lembaga negara di tingkat pusat dan daerah yang terpilih dalam penelitian ini sebanyak 915.504 orang atau sekitar 22 persen dari total jumlah PNS di Indonesia. Responden diwawancarai secara tatap muka, baik daring maupun luring oleh pewawancara yang dilatih. ● mar

Kasus Positif Bertambah 4.585 Orang...

Humas BNPB, Minggu (18/4). Data ini diperbarui setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Kasus positif COVID-19 terbanyak hari ini ditemukan di DKI Jakarta sebanyak 950 kasus. Terbanyak kedua ditemukan di Jawa Barat dengan 769 kasus, disusul Jawa Tengah dengan 396 kasus. Sementara itu, kasus sembuh hari ini 4.873, dan untuk pasien COVID-19 meninggal hari ini dilaporkan ada 96 orang.

Hanya Nusa Tenggara Barat

(NTB) yang melaporkan tidak ada tambahan kasus positif COVID hari ini. Namun ada beberapa daerah yang penambahan kasusnya di bawah 10, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua.

Hingga Minggu (18/4), pemerintah mencatat 5.900.242 orang sudah divaksinasi Covid-19 dosis kedua. Masyarakat yang divaksin berasal dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik dan

lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua.

Informasi tersebut disampaikan Satgas melalui laman www.kemkes.go.id yang dikutip Minggu sore. Sementara jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama berjumlah 10.815.649 orang.

Hingga tahap kedua ini pemerintah menargetkan 40.349.051 orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Cakupan vaksinasi tahap kedua baru mencapai 26,80 persen un-

tuk dosis pertama dan 14,62 persen dosis kedua. Sementara vaksinasi tahap pertama yang menargetkan tenaga kesehatan cakupan sudah mencapai 99,76 persen untuk dosis pertama dan 90,17 persen untuk dosis kedua.

Adapun sasaran pada tahap pertama untuk tenaga kesehatan yakni sebanyak 1.468.764 orang. Sebanyak 1.465.188 tenaga kesehatan sudah divaksinasi dosis pertama dan 1.324.349 telah disuntik dosis kedua.

Sementara 142.886 tenaga kesehatan mengalami penundaan disuntik dosis pertama dan 6.441 untuk dosis kedua.

Vaksinasi Covid-19 diberikan dua dosis dan penyuntikannya dilakukan sebanyak dua kali dalam rentang 14 hari. Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu. ● mar

Tips Jadikan Sistem Kekebalan Tubuh Lebih Kuat saat Berpuasa

JAKARTA (IM) - Di tengah pandemi Covid-19 muncul kekhawatiran saat menjalani ibadah puasa. Di antaranya puasa dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit pernapasan.

Namun, sebetulnya Anda tidak perlu khawatir karena puasa malah dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan. Manfaat puasa di antaranya dapat membantu mengontrol tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, hipertensi, obesitas, menurunkan kadar gula darah, hingga meningkatkan metabolisme.

Berikut adalah beberapa tips agar Anda menikmati ibadah puasa dengan sehat sambil menjaga sistem kekebalan, seperti dilansir dari laman Boldsky, Minggu (18/4).

1. Jangan Lewatkan Sahur

Saat Ramadhan, Anda tidak boleh hanya menunggu waktu berbuka. Pastikan juga Anda bangun di pagi hari untuk sahur. Perlu diketahui, makan dua kali selama bulan puasa akan membuat sistem kekebalan tubuh menjadi lebih aktif.

2. Hindari Gorengan

Memang tidak semua gorengan tak sehat, tetapi makan gorengan terus-menerus selama puasa dapat memengaruhi kesehatan usus dan jantung. Selama sahur serta berbuka, hindari makan keripik hingga kentang goreng.

3. Tingkatkan Asupan Cairan

Meningkatkan asupan cairan saat menjalani puasa sangatlah penting. Anda bisa minum air kelapa, jus lemon, jus mint, atau teh hijau saat sahur dan berbuka. Selain itu, pertahankan juga asupan air putih 2 liter atau setara dengan 8-9 gelas per hari. ● tom

Hindari Minum Kopi di Waktu Ini saat Puasa Ramadhan

JAKARTA (IM) - Selama berpuasa di bulan Ramadhan, banyak kebiasaan yang harus diubah, terutama soal terhadap kompleksitas masalah pendidikan di Tanah Air.

“Saya pikir kalau Mas Mu'ti

diberikan amanah oleh Presiden,

akan memberikan kontribusi

besar terhadap dunia pendidikan

tanah air. Beliau adalah sosok

pendidik, track record nya jelas

serta paham terhadap peta

persoalan pendidikan di Indonesia,”

tutur Huda. ● mar

menang dianjurkan untuk tidak

dikonsumsi pada saat sahur. Tapi,

bukan berarti dilarang sama sekali.

“Kopi di dalamnya ada kafein.

Kafein ada sifat deuretik,

memorog untuk buang air kecil.

Karena kafein itu menghambat

penyerapan natrium. Nah, natrium

dihambat, air jadi keluar,” ujarnya

melalui tayangan Hidup Sehat di

tvOne baru-baru ini.

Selain itu, dokter Irsan meng-

ungkapkan, kafein yang terkandung

dalam kopi, juga merelaksasi otot

kandung kemih, sehingga menyeb-

abkan ingin terus-menerus buang

air kecil. “Banyak teorinya. Tapi

semua ahli sepakat bahwa kopi bisa

merangsang buang air kecil lebih

sering,” ungkap dia.

Maka dari itu, jika kopi dikon-

sumsi pada saat sahur, air yang

diminum pada saat berbuka puasa

hingga sahur, akan lebih cepat

keluar. Lalu, apa akibatnya?

Jadi, lebih cepat haus dan men-

ingkatkan risiko dehidrasi juga,”

tutur dr. Irsan Hasan. ● tom

Apalagi minuman yang

mengandung kafein, seperti

kopi. Banyak anggapan yang

mengatakan, minum kopi ti-

dak diperbolehkan saat sahur.

Benarkah demikian? Apa ala-

sannya?

Spesialis penyakit dalam,

Dr. dr. Irsan Hasan SpPD,

KGEH, mengatakan, kopi

gandung kafein, seperti

kopi. Banyak anggapan yang

mengatakan, minum kopi ti-

dak diperbolehkan saat sahur.

Benarkah demikian? Apa ala-

sannya?

Spesialis penyakit dalam,

Dr. dr. Irsan Hasan SpPD,

KGEH, mengatakan, kopi

gandung kafein, seperti

kopi. Banyak anggapan yang

mengatakan, minum kopi ti-

dak diperbolehkan saat sahur.

Benarkah demikian? Apa ala-

sannya?

Spesialis penyakit dalam,

Dr. dr. Irsan Hasan SpPD,

KGEH, mengatakan, kopi

gandung kafein, seperti

kopi. Banyak anggapan yang

mengatakan, minum kopi ti-

dak diperbolehkan saat sahur.

Benarkah demikian? Apa ala-

sannya?

Spesialis penyakit dalam,

Dr. dr. Irsan Hasan SpPD,

KGEH, mengatakan, kopi

gandung kafein, seperti

kopi. Banyak anggapan yang

mengatakan, minum kopi ti-

dak diperbolehkan saat sahur.

Benarkah demikian? Apa ala-

sannya?

Spesialis penyakit dalam,

Dr. dr. Irsan Hasan SpPD,

KGEH, mengatakan, kopi

gandung kafein, seperti

kopi. Banyak anggapan yang

mengatakan, minum kopi ti-

dak diperbolehkan saat sahur.

Benarkah demikian? Apa ala-

sannya?

Spesialis penyakit dalam,

Dr. dr. Irsan Hasan SpPD,

KGEH, mengatakan, kopi

gandung kafein, seperti

kopi. Banyak anggapan yang

mengatakan, minum kopi ti-

dak diperbolehkan saat sahur.

Benarkah demikian? Apa ala-

sannya?

Spesialis penyakit dalam,

Dr. dr. Irsan Hasan SpPD,

KGEH, mengatakan, kopi

gandung kafein, seperti

kopi. Banyak anggapan yang

mengatakan, minum kopi ti-

dak diperbolehkan saat sahur.

Benarkah demikian? Apa ala-

sannya?

Spesialis penyakit dalam,

Dr. dr. Irsan Hasan SpPD,

KGEH, mengatakan, kopi

gandung kafein, seperti

kopi. Banyak anggapan yang

mengatakan, minum kopi ti-

dak diperbolehkan saat sahur.

Benarkah demikian? Apa ala-

sannya?

Spesialis penyakit dalam,

Dr. dr. Irsan Hasan SpPD,

KGEH, mengatakan, kopi

gandung kafein, seperti

kopi. Banyak anggapan yang

mengatakan, minum kopi ti-

dak diperbolehkan saat sahur.

Benarkah demikian? Apa ala-

sannya?

Spesialis penyakit dalam,

Dr